

## **BAB VII**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **7.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan di Sub Dinas Kesehatan Gawat Darurat dan Bencana Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, yang dilaksanakan dari bulan Mei s/d Juni 2008, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan, yaitu:

##### **7.1.1 Input**

###### **7.1.1.1 SDM**

- a. Jumlah pegawai di Subdinkes Gawat Darurat dan Bencana masih mengalami kekurangan, terutama pegawai yang menguasai bidang manajemen dan pembuatan kebijakan, karena sebagian besar pegawai yang ada di Subdinkes Gawat Darurat dan Bencana adalah petugas lapangan.
- b. Adanya ketidaksesuaian pendidikan formal pegawai di Subdinkes Gawat Darurat dan Bencana dengan Tupoksi pegawai tersebut.
- c. Tidak adanya pelatihan yang terfokus pada penanggulangan bencana banjir, yang secara rutin selalu diselenggarakan oleh Subdinkes Gawat Darurat dan Bencana merupakan pelatihan penanggulangan bencana secara umum.
- d. Motivasi dan semangat kerja para pegawai di Subdinkes Gawat Darurat dan Bencana Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta sudah cukup tinggi. Kesadaran para pegawai akan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dalam upaya

penanggulangan bencana banjir tahun 2007, menjadikan suatu motivasi dalam bekerja, terlebih lagi kekompakan yang terjadi dalam bekerja juga turut menambah semangat kerja.

#### **7.1.1.2 Dana**

Sering terjadinya keterlambatan pengucuran dana, yang menyebabkan terhambatnya kegiatan penanggulangan bencana banjir. Dan keterlambatan ini juga menyebabkan tidak tercukupinya kebutuhan untuk penanggulangan bencana banjir tahun 2007.

#### **7.1.1.3 Sarana**

- a. Sarana untuk penanggulangan bencana banjir dimulai dari sarana transportasi, komunikasi, dan logistik bersumber dari APBD dan APBN.
- b. Sarana yang dimiliki Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta untuk penanggulangan bencana banjir tahun 2007 belum mencukupi kebutuhan, karena Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta belum memiliki sarana transportasi yang dapat digunakan untuk pemberian dukungan kesehatan ke lokasi banjir.
- c. Kondisi sarana yang dimiliki Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta 75% dalam kondisi baik dan layak pakai. Untuk menjaga kondisi sarana yang ada, secara rutin Dinas Kesehatan memberikan perawatan terhadap sarana tersebut.

#### **7.1.1.4 Metode**

Sudah tersedianya buku pedoman penanggulangan banjir bidang kesehatan di Provinsi DKI Jakarta dengan kelengkapan dan kejelasan isi yang sudah baik, yang dapat digunakan sebagai acuan.

#### **7.1.2 Process**

##### **7.1.2.1 Pemberian Dukungan Kesehatan**

- a. Proses penanggulangan bencana banjir yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta adalah dengan menggunakan sistem komando, yaitu dengan mengikutsertakan berbagai organisasi di bidang kesehatan dalam menanggulangi masalah kesehatan akibat kedaruratan dan bencana secara harmoni.
- b. Tenaga kesehatan yang terlibat dalam penanggulangan bencana banjir dari segi jumlah sudah sesuai dengan kebutuhan penanggulangan bencana banjir, namun dari segi kesiapsiagaan masih kurang, karena pelayanan kesehatan di Pos Kesehatan tidak dilakukan 24 jam dan hanya dilakukan pada pagi dan siang hari.
- c. Dukungan kesehatan yang diberikan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta sudah sesuai dengan kebutuhan korban bencana banjir, namun kesesuaian ini tidak sejalan dengan penyaluran dukungan kesehatan tersebut, karena dukungan kesehatan berupa pelayanan kesehatan dan obat-obatan hanya diberikan pada korban banjir yang mengungsi saja, sementara untuk korban banjir yang tidak mengungsi tidak mendapatkan dukungan kesehatan tersebut.

- d. Pemberian dukungan kesehatan yang berupa pelayanan kesehatan dan pemberian obat-obatan dapat ditemui di Puskesmas dan Rumah Sakit yang terdekat dengan lokasi terjadinya bencana banjir. Selain itu didirikan juga Pos Kesehatan yang letaknya berdekatan dengan Pos Pengungsian, sehingga para pengungsi yang membutuhkan pertolongan kesehatan dapat dengan segera memperoleh pertolongan.
- e. Tidak semua Pos Kesehatan atau tempat pemberian dukungan kesehatan untuk para korban banjir memiliki letak yang terjangkau dari lokasi terjadinya banjir.
- f. Hambatan yang paling sering terjadi dalam pemberian dukungan kesehatan adalah hambatan transportasi. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta belum memiliki sarana transportasi yang dapat menembus daerah yang terkena bencana banjir.

#### **7.1.2.2 Ketaatan Terhadap Prosedur**

Pengawasan terhadap kegiatan penanggulangan bencana banjir di DKI Jakarta tahun 2007 selalu dilakukan, pengawasan dilakukan terhadap seluruh tahap penanggulangan bencana. Ketaatan petugas akan prosedur penanggulangan bencana banjir sudah cukup baik.

### 7.1.3 Output

Jumlah dukungan kesehatan yang tersalurkan pada saat terjadi bencana banjir di DKI Jakarta yang terjadi pada tahun 2007 terdiri dari :

- Bantuan tenaga kesehatan:
  - Medis : 24 orang
  - Paramedis: 329 orang
- Bantuan logistik obat: 21 paket
- Bantuan MP-ASI:
  - Bubur: 327 paket
  - Biskuit: 826 paket
- Bantuan logistik non alkes:
  - Perahu karet: 5 buah
  - Velbed: 225 buah
  - Spanduk: 13 buah

Jumlah Pos kesehatan terbanyak terdapat pada tanggal 7 Februari 2007, yaitu sebanyak 259 Pos kesehatan. Sedangkan untuk jumlah Pos kesehatan yang paling sedikit terdapat pada tanggal 11 Februari 2007, yaitu sebanyak 43 Pos kesehatan.

- Jumlah Pos pengungsi: 505 (7 Februari 2007)
- Jumlah pasien: 127.311 orang
- Jumlah pasien dirujuk: 91 orang
- Jumlah meninggal: 48 orang
- Jumlah Kelurahan yang terendam: 79 Kelurahan

## 7.2 Saran

Dari kesimpulan yang sudah dijabarkan sebelumnya, maka berikut ini adalah saran-saran mengenai hal tersebut:

- a. Karena adanya kekurangan jumlah SDM yang dimiliki Subdinkes Gawat Darurat dan Bencana untuk melakukan kegiatan manajemen penanggulangan bencana banjir di DKI Jakarta, untuk mensiasatinya sebaiknya dilaksanakan pendidikan dan pelatihan mengenai manajemen bencana.
- b. Ketidak sesuaian pendidikan formal pegawai di Subdinkes Gawat Darurat dan Bencana dengan Tupoksi pegawai tersebut dapat ditanggulangi dengan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diberikan sesuai dengan bidang atau Tupoksi masing-masing pegawai, dan pegawai yang sudah mendapatkan pelatihan hendaknya membagi ilmu yang diperoleh kepada pegawai lain.
- c. Pelatihan khusus mengenai penanggulangan bencana banjir harus diadakan dan disimulasikan dengan lokasi yang mirip dengan lokasi banjir sebenarnya.
- d. Penganggaran kegiatan penanggulangan bencana banjir dilakukan untuk semua tahap dimulai dari pra banjir sampai dengan pasca banjir. Untuk ketepatan waktu pengucuran dana harus terus ditingkatkan, agar tidak menghambat pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana banjir yang sangat membutuhkan kecepatan dalam penanggulangannya.
- e. Agar upaya mitigasi, kesiapsiagaan dan bantuan kesehatan pada kejadian bencana banjir dapat dilaksanakan lebih cepat dan tepat di masa yang akan datang, diperlukan dukungan semua jajaran yang terlibat sehingga koordinasi baik lintas program maupun lintas sektor dapat dilaksanakn secara terpadu dan terarah.

- f. Sebaiknya pelayanan kesehatan di Pos kesehatan berlangsung selama 24 jam penuh, sebagaimana yang sudah tertera dalam Buku Pedoman Penanggulangan Banjir Bidang Kesehatan di Provinsi DKI Jakarta, bahwa pelayanan kesehatan di Pos kesehatan harus dilakukan 24 jam penuh..
- g. Dukungan kesehatan yang diberikan tidak hanya di Pos kesehatan saja, namun dukungan kesehatan juga harus didistribusikan kepada para korban banjir yang tidak mengungsi.
- h. Diperlukan ketersediaan alat transportasi untuk evakuasi dan pemberian dukungan kesehatan yang dapat menembus wilayah banjir.
- i. Lokasi Pos Kesehatan atau tempat pemberian dukungan kesehatan harus berada di tempat yang terjangkau dari lokasi terjadinya bencana banjir dan aman dari bencana banjir.